

ANALISIS KINERJA STANDAR KEMAMPUAN, KEBUTUHAN DAN UPAYA FISKAL PEMERINTAH KABUPATEN SE-JAWA TIMUR PADA ERA OTODA

Setu Setyawan

Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Malang
Alamat Korespondensi : TEA II J-4Dau Malang
Telpon : 0341-464667, Hp: 081555717583, E-mail: utes@umm.ac.id

ABSTRACT

This study focuses on the problems of development of local government in autonomous areas, to determine the extent to which the standard rate capabilities, and efforts kebutuhan sajuh fiscal and where the level of independence in order to finance the regional administration.

This type of data in this study are secondary data that has been available in the City of Se-East Java data used in data analysis include (1) Budget and Actual Revenue Expenditure his year period 2000-2006, (2) Regional Domestic Product gross (GDP) Se-East Java. (4) GDP of East Java.

PENDAHULUAN

Pada saat ini bangsa Indonesia sedang memasuki masa pemerintahan dari sistem pemerintah yang bersifat sentralistik menuju sistem pemerintah yang lebih bersifat desentralistik sebagai perwujudan dari prinsip demokrasi, dengan mengedepankan peran masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Sedangkan pada masa pemerintahan orde baru, dimana pemerintahan yang amat sentralistik mengakibatkan adanya ketimpangan dalam hal demokrasi berpolitik, hak berpendapat, dan bahkan dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mendukung sistim desentralistik pengelolaan keuangan pemerintah daerah, pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Pemerintahan Daerah (UUPD), Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan disempurnakan dengan UU no 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (UUPK). Terbitnya undang-undang ini merupakan perwujudan perubahan yang mendasar dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

Undang - undang no 22 dan 32 tersebut mengandung beberapa misi yang tersurat. Pertama, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan

sumber daya daerah. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Sukiadi, 2004). Keempat pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang sangat luas atau nyata didalam memanfaatkan dan mengelola keuangannya, dengan demikian otoda mendorong keluasaan menggali potensi daerah tanpa banyak dipengaruhi dan dilendalikan oleh pemerintah pusat.

Kewenangan yang luas yang diberikan kepada pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, kehidupan yang demokratis, adil, rata, dan hubungan yang serasi dalam Republik Indonesia (Pristwanto, 2001). Keberhasilan otonomi daerah harus didukung oleh kemampuan pemerintah daerah dalam bidang penyediaan sumber dana keuangan dari fiscal dan retribusi daerah, seperti yang dinyatakan oleh Kaho (1998) dalam Leo (1999) bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan otonomi daerah harus ditunjang dengan keuangan yang cukup baik yang berasal dari pendapatan asli dari dan bantuan dana dari pusat. Untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja dapat dilihat dari sejauh mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai proporsi yang lebih baik

terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu PAD harus menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. (Sularmi et.al. 2005). Dan seberapa jauh pemerintah daerah bisa memenuhi kebutuhan dananya dapat dilihat dari tingkat kemampuan dan kebutuhan fisalnya.

Tingkat kemampuan dan kebutuhan fiskal suatu daerah dapat dipengaruhi berbagai factor diantaranya tingkat belanja daerah, jumlah penduduk, luas wilayah, Produk Domestic Regional Bruto Daerah (PDRD dan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. sehingga untuk meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus berupaya secara terus-menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangan sendiri. Untuk mendukung upaya peningkatan PAD perlu diadakan pengukuran atau penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara kesenambungan sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada rakyatnya. Jika potensi PAD sangat baik dan meningkat maka suatu daerah bisa dikatakan mandiri. Walaupun mandiri seratus persen hal yang tidak mungkin.

Penelitian ini menfokuskan pada permasalahan pembangunan pemerintah daerah dalam otonomi daerah, guna mengetahui sejauh mana tingkat standar kemampuan, kebutuhan dan upaya fisalnya serta sejauh mana tingkat kemandirian guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingkat kemampuan dan kebutuhan fiskal dapat digunakan sebagai dasar atau standard untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan perolehan dan kebutuhan fiskal, dan juga bisa digunakan sebagai dasar estimasi pendapatan fiskal ke depan. Sementara tingkat kemandirian daerah adalah sejauh mana ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana bantuan dari pemerintah pusat. Dengan mengetahui tingkat kemandirian, pemerintah daerah bisa mengukur kemampuan penyediaan dana mandiri untuk mebiayai belanja daerah, Jika ketergantungannya dana dari pemerintah pusat sangat tinggi maka pemerintah daerah bisa lebih mengefektifkan atau meningkatkan pendapatan asli daerah.

METODELOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian dengan rincian sebagai berikut :

Jenis dan teknik pengambilan data.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang telah tersedia di Pemerintah Kota Se-Jawa Timur Data-data yang digunakan dalam analisis data meliputi (1) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Realisasinya, periode tahun 2000-2006, (2) Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) Se-Jawa Timur. (4) PDRB Jawa Timur.

Variable yang diukur dalam penelitian.

- a. **Variable Kemandirian Pemerintah Daerah.** Tingkat kemandirian diukur dengan membandingkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan Pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat baik dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Jika hasilnya tinggi maka tingkat kemandiriannya rendah.
- b. **Variable Standard Kebutuhan Fiskal daerah.** Standard Kebutuhan fiskal daerah diukur dengan membagi pengeluaran daerah dibagi dengan jumlah penduduk hasilnya dibagi dengan jumlah pemerintah daerah di suatu daerah di wilayah Propinsi. Jika prosentasi hasil tinggi maka tingkat kebutuhannya tinggi.
- c. **Variable Indeks Pelayanan Publik (IPPP).** Variable ini untuk mengukur tingkat pelayanan publik di pemerintah daerah berkaitan dengan kemampuan hasil fisalnya dengan membandingkan jumlah aktual perkapita untuk jasa pelayanan publik dengan jumlah penduduk dan hasilnya dibagi dengan Standar kebutuhan Fiskal. Jika hasil pengukurannya tinggi maka tingkat pelayanan publik sangat baik.
- d. **Variable Tingkat kapasitas fiskal** Kapasitas fiskal untuk mengukur derajat kemampuan fiskal pada suatu pemerintah daerah, jika hasil perhitungan tinggi maka kemampuan fisalnya tinggi, untuk mengukur kapasitas fiskal sebagai berikut :

$$\text{Kapasitas Fiskal standar} = \frac{\text{jumlah PDRB/Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah pemerintah daerah}}$$

Kemudian untuk mengukur kapasitas fiskal dengan menggunakan model

$$\text{Kapasitas Fiskal} = \frac{\text{Jumlah PDRB/Jumlah penduduk}}{\text{Kapasitas fiskal standar}}$$

e. Variable Upaya fiskal (Tax Effort)

Kemampuan untuk menghasilkan fiskal pemerintah daerah, jika hasilnya tinggi maka kemampuan untuk menghasilkan fiskal daerah dan juga menunjukkan posisi fiskal daerah. Model yang digunakan untuk mengukur upaya fiskal adalah ; Elastisitas = perubahan PAD / Perubahan PDRB

Teknik dan analisis data penelitian

Analisis data penelitian untuk menjelaskan dan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dan untuk menjawab tujuan penelitian, maka teknik analisa data sebagai berikut :

- a. Mengukur derajat kemandirian, kebutuhan dan standar fiskal, upaya fiskal pemerintah daerah sebagai berikut :

Kemampuan fiskal daerah.

- Kemampuan PAD atas dana dari pemerintah pusat. Kemampuan PAD = PAD/Total Dana Pemerintah Pusat
- Kemampuan PAD dengan Dana Bagi Hasil (PAD & DBH) PAD & DBH = PAD + DBH / Dana Pemerintah Pusat

Tingkat kebutuhan fiskal (fiscal need)

- Mengukur standar kebutuhan fiskal dengan menggunakan model :

$$\text{Standar kebutuhan fiskal} = \frac{\text{Jumlah Pengeluaran daerah / jumlah penduduk}}{\text{Jumlah pemerintah kabupaten/kota.}}$$

- Mengukur Indeks Pelayanan Publik Perkapita (IPPP) dengan menggunakan model sebagai berikut :

IPPP =

$$\frac{\text{Jumlah aktual perkapita untuk jasa pelayanan publik /jumlah penduduk}}{\text{Standar kebutuhan Fiskal}}$$

Tingkat kapasitas Fiskal

$$\text{Kapasitas Fiskal standar} = \frac{\text{jumlah PDRB/Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah pemerintah daerah}}$$

Kemudian untuk mengukur kapasitas fiskal dengan menggunakan model

$$\text{Kapasitas Fiskal} = \frac{\text{Jumlah PDRB/Jumlah penduduk}}{\text{Kapasitas fiskal standar}}$$

Upaya fiskal (Tax Effort)

Elastisitas = perubahan PAD / Perubahan PDRB

Analisis hasil pengukuran data.

Analisis hasil pengukuran data digunakan untuk memberikan penjelasan (description) tentang hasil pengukuran yang dikaitkan dengan data-data bukti empiris yang terkait dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Jawa timur terletak dibagian timur pulau Jawa Diantara 7 – 8 derajat Lintang selatan, 111 – 114 bujur timur dengan luas wilayah 47,921 Km², disebelah barat berbatasan dengan propinsi Jawa tangan dan di sebelah timur perbatasan dengan wilayah Bali, sebelah barat selat bali, sebelah utara dengan laut Jawa Dan sebelah selatan lautan samudra Indonesia, hamper dua pertiga dari daratan Jawa timur merupakan daerah perbukitan dan pegunungan, sedangkan lainnya adalah daratan rendah dan juga terdapat 48 buah gunung yang sebagian besar berada di bagian tengah dan selatan. Dari daerah pegunungan mengalir sungai besar dan kecil yang jumlahnya lebih dari 83 sungai , sungai – sungai itu bermuara di ke Samudra Indonesia,

laut jawa, selat madura, selat bali dank ke aliran sungai-sungai besar.

Iklim daerah jawa Timur terletak selatan garis katulistiwa, sehingga memiliki iklim tropis yang terbagi dalam dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau, musim hujan anatar bulan Oktober – April dan Musim kemarau Mei – Nopember, diantara musim itu ada musim panca roba atau musim peralihan yaitu sekitar bulan April-Mei, dan Oktober- Nopember. Suhu sekitar 20 C– 30 C.

Luas wilayah Jawa Timur 147.130,15 Km2 terbagi atas Kawasan hutan 12.261,64 Km2 (26,02 %), Persawahan 12.286,7 % (26,07 %), Pertanian tanah kering 11.44915 (24,29 %), pemukiman/ perkampungan 12.12 (12,12 %), perkebunan

1.581,94 (3,36 %) tanah tandus/rusah 1.293,78 (2,75 %), tambak/kolam 737,71 (1,57 %), kebun campuran 605,65 (1,57 %) dan selebihnya terdiri dri danau rawa, padang rumput 1,201,42 (2,55 %), Jawa Timur memiliki 60 buah pulau besar dab kecil.

Jumlah penduduk Jawa Timur sampai tahun 2007 36.446.720 orang. Rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun mencapai 0,7 %, walaupun telah menjalankan program keluarga berencana tetapi pertumbuhan penduduk sangat meningkat. Penyebaran penduduk di Jawa Timur menyebar di 29 kabupaten dan 9 Kota, berikut ini table penyebaran penduduk di Jawa Timur.

Tabel 1. Jumlah penduduk Jawa Timur 2007

Kode	Kab./Kota	2007	kode	Kab/Kota	2007
01	Pacitan	512,740	20	Magetan	631,350
02	Ponorogo	867,480	21	Ngawi	812,700
03	Trenggalek	685,570	22	Bojonegoro	1.211,740
04	Tulungagung	921,680	23	Tuban	1.100,190
05	Blitar	1.061,650	24	Lamongan	1.224,290
06	Kediri	1.433,270	25	Gresik	1.035,560
07	Malang	2.508,630	26	Bangkalan	807,200
08	Lumajang	947,350	27	Sampang	668,960
09	Jember	2.126,380	28	Pamekasan	754,470
10	Banyuwangi	1.508,840	29	Sumenep	1.004,490
11	Bondowoso	687,270	30	K. Kediri	282,660
12	Situbondo	618,320	31	K. Blitar	127,850
13	Probolinggo	1.033,130	32	K. Malang	899,800
14	Pasuruan	1.432,750	33	K.Probolinggo	217,710
15	Sidoarjo	1.802,050	34	K. Pasuruan	184,760
16	Mojokerto	913,330	35	K. Mojokerto	120,750
17	Jombang	1.134,850	36	K. Madiun	172,950
18	Nganjuk	982,780	37	K. Surabaya	3.179,290
19	Madiun	654,300	38	K. Batu	177,650
Jumlah penduduk Jawa Timur					36.446,720

Sumber data: Dinas kependudukan Jawa Timur.

Keberadaan pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur telah berkembang secara luar biasa dan akan berada pada kedudukan terdepan di asia pada dasawarsa mendatang. Provinsi Jawa Timur juga merupakan pusat kegiatan sosial dan budaya dengan berbagai sarana terbaik di Indonesia dalam bidang pendidikan, budaya, olah raga, dan kesehatan.

Pembagian wilayah administrasi Pemerintah Propinsi Jawa Timur pada tahun 2003 s/d tahun 2007 terbagi dalam 4 (empat) Badan Koordinasi . Wilayah / Pembantu Gubernur, 29 Kabupaten dan 9Kota serta jumlah kecamatan. berjumlah 657 kecamatan. Perwakilan kecamatan sejak tahun 2003 telah ditiadakan, sebelumnya berjumlah 114, dan

Kota Administratif Batu sejak tahun 2003 telah menjadi Kota, sedang Kota Administratif Jember berdasarkan peraturan perundangan telah dicabut dengan demikian Jember hanya sebagai Kabupaten. Jumlah kelurahan sebanyak 785 Kelurahan dan Desa sebanyak 8.484 desa.

Data Penelitian

Data Pendapatan Domestic Bruto Jawa Timur.

Berikut ini d pada tabel 2 disajikan data PDRB Jawa Timur dalam kurun waktu 2007 yang diperoleh dari Kepala Dinas Kependudukan Jawa Timur.

Data Realisasi Anggaran Daerah Tahun 2007

Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Dana Belanja periode 2007 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Table 2. Pendapatan Domestic Regional Bruto Jawa Timur Jumlah Wilayah Kecamatan

No	Kab./Kota	2007	Kec	No	Kab/Kota	2007	Kec
1	Pacitan	1.267.333,22	12	20	Magetan	2.586.677,79	13
2	Ponorogo	2.398.518,07	20	21	Ngawi	2.517.655,90	17
3	Trenggalek	1.713.454,11	13	22	Bojonegoro	4.677.557,17	24
4	Tulungagung	6.655.118,34	19	23	Tuban	4.807.652,56	19
5	Blitar	4.681.637,54	22	24	Lamongan	4.105.933,67	24
6	Kediri	5.147.017,13	23	25	Gresik	15.970.093,93	18
7	Malang	11.809.871,30	33	26	Bangkalan	2.784.486,41	18
8	Lumajang	4.544.471,93	20	27	Sampang	2.140.297,24	12
9	Jember	8.246.083,44	24	28	Pamekasan	1.845.038,73	13
10	Banyuwangi	8.206.995,24	21	29	Sumenep	4.881.485,24	25
11	Bondowoso	1.813.132,05	17	30	K.Kediri	21.537.141,83	3
12	Situbondo	2.774.229,47	17	31	K.Blitar	628.976,80	3
13	Probolinggo	5.552.620,17	24	32	K.Malang	10.814.141,34	5
14	Pasuruan	5.664.944,03	24	33	K.Probolinggo	1.539.219,40	3
15	Sidoarjo	20.896.159,42	18	34	K. Pasuruan	1.007.085,47	3
16	Mojokerto	4.987.285,21	17	35	K. Mojokerto	1.205.866,62	2
17	Jombang	5.291.675,23	20	36	K. Madiun	947.095,96	3
18	Nganjuk	3.869.046,25	20	37	K. Surabaya	66.345.470,92	23
19	Madiun	2.289.363,14	15	38	K. Batu	1.000.423,19	3

Table 3. RAPBD Periode 2007

N0	Nama Daerah	PAD	DanaPusat	Pembiayaan
01	Pacitan	11.843,02	381.025,45	402.033,75
02	Ponorogo	24.587,83	490.156,75	563.633,12
03	Trenggalek	29.090,78	499.019,32	696.258,08
04	Tulungagung	30.931,97	562.622,17	618.957,54
05	Blitar	23.379,87	588.195,10	641.564,90
06	Kediri	42.961,35	624.892,10	744.131,07
07	Malang	53.042,62	868.440,00	1.047.465,05
08	Lumajang	36.142,88	481.236,00	532.015,88
09	Jember	44.204,51	527.162,68	641.898,30
10	Banyuwangi	39.815,69	699.274,19	801.734,23
11	Bondowoso	17.154,54	382.822,89	420.484,47
12	Situbondo	14.576,09	389.133,41	420.450,05
13	Probolinggo	18.546,72	491.473,00	519.568,64

N0	Nama	PAD	DanaPusat	Pembiayaan
14	Pasuruan	56.001,12	528.405,69	653.014,47
15	Sidoarjo	156.013,93	668.184,31	1.053.795,76
16	Mojokerto	38.102,12	443.760,00	509.573,32
17	Jombang	41.344,16	450.850,49	490.976,70
18	Nganjuk	39.566,72	566.959,61	623.694,91
19	Madiun	36.142,88	481.236,00	532.015,88
21	Magetan	26.839,30	473.964,70	523.325,03
22	Ngawi	13.953,32	503.658,47	516.360,87
23	Bojonegoro	39.086,40	599.602,88	599.602,88
24	Tuban	56.344,83	317.078,00	439.968,19
25	Lamongan	32.744,38	559.671,18	628.766,15
26	Gresik	85.069,89	475.590,00	604.395,25
27	Bangkalan	23.459,66	444.763,23	507.317,06
28	Sampang	13.095,02	379.276,00	389.738,58
29	Pamekasan	20.500,94	415.710,00	482.752,57
30	Sumenep	29.090,78	499.019,32	696.258,08
31	Kota Kediri	40.748,00	393.834,95	378.310,97
32	Kota Blitar	19.052,02	200.436,49	234.275,17
33	Kota Malang	56.018,89	432.795,72	534.583,24
34	Kota	24.375,43	238.019,78	281.371,19
35	Kota Pasuruan	12.622,24	211.098,38	253.241,48
36	Kota	13.843,64	228.934,54	258.578,23
37	Kota Madiun	17.015,53	242.106,86	288.636,03
38	Kota Surabaya	536.422,00	826.860,59	1.935.388,32
39	Kota Batu	11.019,12	191.242,84	205.593,26

Pengukuran Data

Tingkat Kemampuan atau kemandirian daerah

Tujuan pengukuran kemandirian adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketergantungan dana yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk membiaya pengeluaran dari dana yang diberikan oleh pemerintah pusat, semakin kecil ratio

ini, maka suatu daerah semakin mandiri, tetapi tidak ada satupun daerah di Indonesia yang betul betul sertus persen mandiri. Tingkat kemandirin dihitung dengan membanding Pendapatan Daerah (PAD ditambah dana bagi hasil) dengan yang diberikan oleh pemerintah pusat (dana alokasi umum dan khusus :

Table 4 Tingkat Kemampun atau Kemandirian 2007

No	Nama Daerah	Ratio	No	Nama Daerah	Ratio
1	Pacitan	3,11	20	Magetan	5,66
2	Ponorogo	5,02	21	Ngawi	2,77
3	Trenggalek	5,83	22	Bojonegoro	6,25
4	Tulungagung	5,50	23	Tuban	17,77
5	Blitar	3,97	24	Lamongan	5,85
6	Kediri	6,88	25	Gresik	17,89
7	Malang	6.10	26	Bangkalan	5,27
8	Lumajang	7,51	27	Sampang	3,45
9	Jember	8,39	28	Pamekasan	4,93
10	Banyuwangi	5,69	29	Sumenep	5,83

No	Nama Daerah	Ratio	No	Nama Daerah	Ratio
11	Bondowoso	4,48	30	Kota Kediri	10,35
12	Situbondo	3,75	31	Kota Blitar	9,51
13	Probolinggo	3,77	32	Kota Malang	12,94
14	Pasuruan	10,60	33	Kota Probolinggo	10,24
15	Sidoarjo	23,35	34	Kota Pasuruan	5,98
16	Mojokerto	8,59	35	Kota Mojokerto	6,05
17	Jombang	9,17	36	Kota Madiun	7,03
18	Nganjuk	6,98	37	Kota Surabaya	64,87
19	Madiun	6,10	38	Kota Batu	5,76

Tingkat Kapasitas fiskal (Fiscal Capacity Indeks)

Kapasitas fiskal ini mengukur tentang kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Semakin tinggi hasilnya maka kapasitas fiskal suatu daerah semakin tinggi. Indek ini dikur dengan membanding hasil PDRB dibagi Jumlah penduduk dibandingkan dengan kapasitas fiskal standar.

Table 5. Pengukuran Kapasitas fiskal 2007

N0	Nama Daerah	PDRB	Kec	Standar Keb. fiskal	Kapasiata fiskal
01	Pacitan	1.267.333,22	12	65.340,74	12,00
02	Ponorogo	2.398.518,07	20	32.486,81	20,00
03	Trenggalek	1.713.454,11	13	78.122,31	13,00
04	Tulungagung	6.655.118,34	19	35.344,93	19,00
05	Blitar	4.681.637,54	22	27.468,60	22,00
06	Kediri	5.147.017,13	23	22.573,22	23,00
07	Malang	11.809.871,30	33	6.457,51	33,00
08	Lumajang	4.544.471,93	20	28.079,16	20,00
09	Jember	8.246.083,44	24	12.578,07	24,00
10	Banyuwangi	8.206.995,24	21	25.302,76	21,00
11	Bondowoso	1.813.132,05	17	35.989,32	17,00
12	Situbondo	2.774.229,47	17	39.999,28	17,00
13	Probolinggo	5.552.620,17	24	20.954,47	24,00
14	Pasuruan	5.664.944,03	24	18.990,71	24,00
15	Sidoarjo	20.896.159,42	18	32.487,56	18,00
16	Mojokerto	4.987.285,21	17	32.819,35	17,00
17	Jombang	5.291.675,23	20	21.631,79	20,00
18	Nganjuk	3.869.046,25	20	31.731,16	20,00
19	Madiun	2.289.363,14	15	29.409,14	15,00
20	Magetan	2.586.677,79	13	63.761,42	13,00
21	Ngawi	2.517.655,90	17	37.374,39	17,00
22	Bojonegoro	4.677.557,17	24	20.617,83	24,00
23	Tuban	4.807.652,56	19	21.047,47	19,00
24	Lamongan	4.105.933,67	24	21.399,01	24,00
25	Gresik	15.970.093,93	18	32.424,50	18,00
26	Bangkalan	2.784.486,41	18	34.916,11	18,00
27	Sampang	2.140.297,24	12	48.550,31	12,00
28	Pamekasan	1.845.038,73	13	49.219,73	13,00
29	Sumenep	4.881.485,24	25	27.725,83	25,00
30	Kediri	21.537.141,83	3	446.131,95	3,00

N0	Nama Daerah	PDRB	Kec	Standar Keb.	Kapasita
31	Blitar	628.976,80	3	610.807,38	3,00
32	Malang	10.814.141,34	5	118.822,68	5,00
33	Probolinggo	1.539.219,40	3	430.804,27	3,00
34	Pasuruan	1.007.085,47	3	456.883,67	3,00
35	Mojokerto	1.205.866,62	2	1.070.717,31	2,00
36	Madiun	947.095,96	3	556.299,57	3,00
37	Surabaya	66.345.470,92	23	26.467,33	23,00
38	Batu	1.000.423,19	3	385.764,63	3,00

Tingkat Kebutuhan fiscal

Kebutuhan fiscal (fiscal need) kebutuhan dana daerah untuk membiayai semua pengeluaran

atau belanja daerah dalam rangka menyediakan pelayanan public. Faktor-faktor untuk mengukur tingkat kebutuhan fiscal (Fiscal need).

Tabel 6. Standar Kebutuhan Fiskal (SKF)

No	Daerah	Belanja penduduk	PPPperkapita	kec	SKF	IPP	
1	Pacitan	402.033,75	512,74	784.088,91	12	65.340,74	12,00
2	Ponorogo	563.633,12	867,48	649.736,16	20	32.486,81	20,00
3	Trenggalek	696.258,08	685,57	1.015.590,06	13	78.122,31	13,00
4	Tulungagung	618.957,54	921,68	671.553,62	19	35.344,93	19,00
5	Blitar	641.564,90	1.061,65	604.309,24	22	27.468,60	22,00
6	Kediri	744.131,07	1.433,27	519.184,15	23	22.573,22	23,00
7	Malang	534.583,24	2.508,63	213.097,68	33	6.457,51	33,00
8	Lumajang	532.015,88	947,35	561.583,24	20	28.079,16	20,00
9	Jember	641.898,30	2.126,38	301.873,75	24	12.578,07	24,00
10	Banyuwangi	801.734,23	1.508,84	531.358,02	21	25.302,76	21,00
11	Bondowoso	420.484,47	687,27	611.818,46	17	35.989,32	17,00
12	Situbondo	420.450,05	618,32	679.987,79	17	39.999,28	17,00
13	Probolinggo	519.568,64	1.033,13	502.907,32	24	20.954,47	24,00
14	Pasuruan	653.014,47	1.432,75	455.776,98	24	18.990,71	24,00
15	Sidoarjo	1.053.795,76	1.802,05	584.776,09	18	32.487,56	18,00
16	Mojokerto	509.573,32	913,33	557.929,03	17	32.819,35	17,00
17	Jombang	490.976,70	1.134,85	432.635,77	20	21.631,79	20,00
18	Nganjuk	623.694,91	982,78	634.623,12	20	31.731,16	20,00
19	Madiun	288.636,03	654,3	441.137,14	15	29.409,14	15,00
20	Magetan	523.325,03	631,35	828.898,44	13	63.761,42	13,00
21	Ngawi	516.360,87	812,7	635.364,67	17	37.374,39	17,00
22	Bojonegoro	599.602,88	1.211,74	494.828,00	24	20.617,83	24,00
23	Tuban	439.968,19	1.100,19	399.902,01	19	21.047,47	19,00
24	Lamongan	628.766,15	1.224,29	513.576,15	24	21.399,01	24,00
25	Gresik	604.395,25	1.035,56	583.640,98	18	32.424,50	18,00
26	Bangkalan	507.317,06	807,2	628.489,92	18	34.916,11	18,00
27	Sampang	389.738,58	668,96	582.603,71	12	48.550,31	12,00
28	Pamekasan	482.752,57	754,47	639.856,55	13	49.219,73	13,00
29	Sumenep	696.258,08	1.004,49	693.145,86	25	27.725,83	25,00

No	Daerah	Belanja	penduduk	PPPperkapita	kec	SKF	IPP
30	Kediri	378.310,97	282,66	1.338.395,85	3	446.131,95	3,00
31	Blitar	234.275,15	127,85	1.832.422,14	3	610.807,38	3,00
32	Malang	534.583,24	899,8	594.113,40	5	118.822,68	5,00
33	Probolinggo	281.371,19	217,71	1.292.412,80	3	430.804,27	3,00
34	Pasuruan	253.241,48	184,76	1.370.651,01	3	456.883,67	3,00
35	Mojokerto	258.578,23	120,75	2.141.434,62	2	1.070.717,31	2,00
36	Madiun	288.636,03	172,95	1.668.898,70	3	556.299,57	3,00
37	Surabaya	1.935.388,32	3.179,29	608.748,59	23	26.467,33	23,00
38	Batu	205.593,26	177,65	1.157.293,89	3	385.764,63	3,00

Pembahasan dan hasil penelitian.

Kemampuan atau kemandirian keuangan daerah pemerintah Daerah Se Jawa Timur

Ada tiga aspek penting yang akan dilakukan analisis untuk melihat sejauh mana tingkat kemampuan atau kemandirian daerah, kemampuan fiskal daerah dan kemampuan kebutuhan fiskal daerah.

Otonomi atau desentralisasi fiskal dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Dari pengukuran pada table 4, dapat diketahui bahwa tingkat kemampuan kemandirian atau Dana yang disediakan pemerintah daerah dari dana pusat dari 38 daerah ada sepuluh besar dikatakan lebih mampu atau mandiri, yaitu sebagai berikut kota Surabaya 64,87 % , Kab. Sidoarjo 23,35 % , kab. Gresik 17,89 % , Kab. Tuban 17,77 % , Kota Malang 12,94 % , Kab. Pasuruan 10,24 % , Kota Kediri 10,35 % , Kota Kediri 10,35 % , Kota Probolinggo 10,24 % kab. Jombang 9,17 % dan Kab. Mojokerto 8,59 % . Sementara urutan terkecil dibawah 5 % adalah Kab. Ngawi 2,77 % , Kab. Pacitan 3,11 % , Kab. Sampang 3,45 % , Kab. Situbondo 3,75 % , Kab. Probolinggo 3,77 % Dan Kab. Blitar 3,97 % . Perlu diketahui bahwa tidak pemerintah daerah yang dikategorikan 100 % mandiri atau mampu menyediakan dana dari perolehan fiskalnya. Namun demikian analisis ini dapat dijadikan penilaian atas prestasi atau kinerja daerah untuk memperoleh pendapatan asli daerah.

Sebagaimana dipahami bahwa pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung untuk pembiayaan dalam rangka otonomi daerah dan PAD merupakan aspek terpenting untuk mewujudkan kemandirian atau kemampuan keuangan daerah. Dengan adanya undang –undang

otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk meningkatkan PAD dengan menggali potensi daerah.

Dilihat dari pendapatan asli daerah maka semua pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten tidak ada yang mandiri atau mampu menyediakan dana sendiri untuk menopang belanja daerah hanya Kota Surabaya yang mampu menyediakan dana diatas 50 % dari dana pemerintah pusat yaitu sebesar 64, 87 % . Selain Surabaya semua pemerintah daerah se Jawa Timur masih jauh dari kemandirian atau kemampuan menyediakan dana untuk biaya pembangunan.

Dilihat dari besarnya sumbangan pemerintah pusat adalah Kab. Malang Rp. 868.440.000.000,00. Kota Surabaya Rp 826.860.590.000,00. Kab. Banyuwangi Rp.699.274.000.000,00. Kab. Sidoarjo Rp. 688.184.310.000,00. Kab. Kediri Rp. 624.892.100.000,00. Kab. Blitar 588.195.000.000,00 dan Kab. Nganjuk Rp. 566.459.610.000,00. Sementara yang memperoleh sumbangan dana dari pemerintah pusat yang paling rendah adalah Kota Batu. 191.242.000.000,00. Kota Blitar 200.436,490.000,00. Kota Pasuruan Rp. 211.098.000,00. Kota Mojokerto 228.943.540.000,00 dan Kota Madiun Rp 242.106.860.000,00

Sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dana ini sebagian besar digunakan untuk belanja rutin daerah porsi terbesar adalah belanja gaji dan tunjangan pegawai Pemda. Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana dari pemerintah pusat yang diperuntukan pembiayaan atas proyek atau pembangunan fisik dikelola oleh pemerintah daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana berupa bagi hasil yang diperoleh dari pemerintah pusat atas Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak

Perolehan Hak tanah dan Bangunan, pajak bea cukai rokok dan bagi hasil sumber-sumber alam.

Kemandirian atau Kemampuan daerah ditinjau dari Kapasitas Fiskal.

Kemampuan daerah se Jawa Timur jika ditinjau dari kapasitas fiskalnya dari hasil perhitungan pada table 5, dimana kapasitas terbesar adalah Kota Mojokerto sebesar Rp. 1.070.717,31 Kota Madiun sebesar Rp. 556.299.57, Kota pasuruan Rp. 456.883,67, Kota Kediri Rp. 446.131,95. Kota Probolinggo Rp. 430.804,27 dan Kota Batu 385.764,63. dan Kota Malang Rp. 118.822,68. Kapasitas yang tinggi dipengaruhi oleh Luas Wilayah atau Banyaknya kecamatan yang ada di daerah tersebut. Oleh karena itu hampir semua pemerintah kota di Jawa Timur mempunyai kapasitas fiskal yang tinggi dari pada pemerintah kabupaten hal ini disebabkan PDRB didistribusikan dengan wilayah kecamatan yang kecil.

Hasil ini diperoleh dari perbandingan antara PDRB dengan jumlah penduduk dan kapasitas fiskal standarnya. Oleh karena itu kalau ingin menginginkan hasil yang semakin meningkat maka dalam hal ini pemerintah daerah Se Jawa Timur harus bersuaha untuk meningkatkan PDRBnya. Salah satu indicator keberhasilan suatu daerah dalam bidang ekonomi dapat dilihat PDRBnya. Karena PDRB dapat dilihat dari 3 komponen, yaitu komponen produksi, komponen pendapatan dan pengeluaran. Namun tiga komponen yang paling sering dijadikan tolok ukur keberhasilan bidang ekonomi adalah komponen produksi.

Komponen produksi dapat dilihat sebagai hasil perhitungan dari keseluruhan aktivitas produksi baik dari pemerintah maupun swasta, dari sector pertanian, industri dan jasa selama kurun waktu satu tahun. Lebih lanjut aktivitas produksi atau kegiatan ekonomi masyarakat dalam suatu daerah dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) sector yaitu sector pertanian, sector pertambangan, sector industri pengolahan, sector listruik & air, sector bangunan &kontruksi, sector perdagangan hotel & restoran, sector pengangkutan & komunikasi

Dari ketiga factor tersebut yang paling dijadikan tolok ukur sebagai pengukur kinerja

keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah adalah factor produksi. Factor produksi merupakan yang menghitung keseluruhan kegiatan produksi baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun yang dilakukan sector swasta, dari aktivitas industri manufaktur, industri pertanian dan industri jasa. Baik yang dilakukan oleh pengusaha besar, menengah maupun Usaha Kecil Dan Mikro.

Dalam kegiatan ekonomi produktif ada 10 sector usaha produksi yaitu pertanian, pertambangan, industri manufaktur, industri keuangan perbankan, perdagangan, kontruksi/ bangunan, hotel & restoran. Pengangkutan & komunikasi dan Jasa lainnya. Dengan melihat aktivitas produktif tersebut maka dapat diketahui kinerja ekonomi pemerintah daerah yang berkaitan dengan aspek pertumbuhan dan aspek kontribusi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Pemerintahan Daerah (UUPD), Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan disempurnakan dengan UU no 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (UUPK). Alokasi dana umum (DAU) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tingkat I dan II, sekurang-kurangnya 25 % dari total penerimaan dalam negeri yang dianggarkan di APBN, kemudian dibagikan ke pemerintah daerah 22,5 % ke Pemerintah Daerah Kab/Kota dan 2,5 % ke Pemerintah Propinsi. Sementara besarnya pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) ke pemerintah daerah berdasarkan pada sisi kebutuhan fiskal yang mencerminkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis dan tingkat pendapatan masyarakat (kelompok masyarakat miskin) dengan sisi kemampuan fiskal (kapaistas fiskal) dengan melihat potensi daerah. Sementara potensi daerah dapat dilihat pertumbuhan industri, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, indicator untuk melihat bahwa pertumbuhan ekonomi semakin baik adalah dengan melihat indeks kesehatan, pendidikan, daya beli, pembangunan manusia dan indeks penyerapan tenaga kerja.

Dilihat dari kapasitas fiskal yang tertinggi pemerintah kabupaten & Kota Se Jawa Timur dicapai oleh Malang 33,00 % dan yang paling rendah adalah Mojokerto

Kemandirian atau kemampuan Daerah Pemerintah Kota Ditinjau Dari tingkat kebutuhan Fiskal.

Kemandirian fiskal (keuangan) daerah pemerintah kota se Jawa Timur dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu dari hasil perhitungan, pada table 4, dimana kemampuan daerah jika dilihat dari tingkat kebutuhan fiskal yang dihitung dari tingkat pengeluaran daerah disbanding dengan jumlah penduduk dan mempertimbangkan jumlah wilayah atau kecamatan.

Dilihat dari perhitungan table 5 dapat dilihat bahwa Kota Mojokerto mempunyai tingkat kebutuhan fiskal paling tinggi sebesar Rp. 1.070.717,31 yang diperoleh dari pengeluaran daerah perkapita sebesar Rp. 2.141.434,62 dengan jumlah 2 kecamatan. Urutan kedua ditempati oleh kota Kediri dengan tingkat kebutuhan fiskal sebesar Rp. 610.807,38 yang diperoleh dengan pengeluaran perkapita sebesar Rp. 1.338.395,85. dengan jumlah kecamatan 3. urutan ke tiga ditempati pemerintah madiun dengan kebutuhan fiskalnya Rp. 556.299,57 yang diperoleh dengan pengeluaran penduduk per kapita sebesar Rp. 1.668.898.70 sementara tingkat kebutuhan fiskal yang paling rendah adalah kabupaten Malang sebesar Rp. 6.457,51 dengan pengeluaran per kapita Rp.213.097,68 hal ini disebabkan jumlah wilayah dan penduduk yang besar 33 kecamatan dan jumlah penduduk 2.508.630.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut Dari hasil pengukuran dan analisis kemampuan daerah untuk menyediakan dana yang digali dari potensi daerahnya menunjukkan bahwa Surabaya meruapan daerah yang paling mampu menyediakan dana untuk belanja daerah sebesar

64,87 % sisanya dari pemerintah pusat, kemudian disusul Sidoarjo 23,35 %. Yang paling rendah adalah kabupaten Ngawi 2,77 % dan Kab. Pacitan 3.11 %, Kab. Blitar 3,97 %.

Tingkat kapasitas fiskalnya yang paling tinggi adalah kabupaten Malang 33 % dan paling rendah Mojokerto 2 %. Untuk tingkat kebutuhan fiskalnya yang paling tinggi adalah Kota Mojokerto Rp. 1.070.717,31 dan yang paling rendah adalah Kab, Malang.

Saran

Dari hasil kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, dapat disarankan yang bisa diharapkan dapat digunakan menjadikan masukan dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan di wilayah Jawa Timur antar lain

- ◆ Melihat ketergantungan yang sangat besar terhadap dana pemerintah pusat kecuali Kota Surabaya, maka perlu upaya-upaya meningkatkan pendapatan Asli Daerah baik melalui intensifikasi pajak & retribusi daerah juga menggali objek pajak yang baru (ektensifikasi).
- ◆ Pemerintah pusat sebagai memberikan semua pajak yang berasal dari potensi daerah seperti PBB, Bea Cukai dan Porsi pembagian pendapatan pengelolaan sumber alam kepada daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Anita Wulandari 2001, Akuntansi Kemampuan Keuangan Daerah Studi Kasus Kota Jambi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal Penelitian JKAP. MAP-UGM Vol 5 November.

Ananda, F Candra 2005 " Analisis Problem of the implementation of fiscal decentralization in regional autonomy: the case of Malang municipaty and trenggalek distrik (On line <http://www.Geogle.com> (diakses Juli 2007)

CCAPS (1970) " Commite on Concepts of Accounting Applicable to the Public

Sector dari American Accounting Association

- Harto (2005), Analisis kinerja keuangan daerah Kab Pati. Skripsi tidak dipublikasikan.
- Halim Abdul " Akuntansi Keuangan Daerah " Salemba Empat 2002
- Iwan Triyuwono, Konsep Akuntansi Publik dalam Konteks Demokratisasi Ekonomi-Politik Indonesia, Jurnal Ilmiah "Ekonomi Politik dan Akuntabilitas Publik" Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 5 Februari 1999
- Mardiasmo (2003) " Membangun pemerintahan yang akuntable " Jurnal Ilmiah " Akuntansi Di Universitas Gajah Mada.
- Mugiyanto 2001. Dampak Pelaksanaan UU no 18 tahun 1997 terhadap kinerja Keuangan daerah: studi kasus di Kabupaten Pemalang. JKAP MAP-UGM
- Leo, Arifin. 1999. " Kemampuan Pendapatan PAD dalam pelaksanaan Otda. Jurnal Sosial Poilitika edisi 2 FISIP UI Depok.
- Pristwanto, 2001, "Analisis Akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dalam sistim otonomi daerah" Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Diterbitkan oleh FE. Akuntansi- UMS Vo 1.
- Stewart, Richard E, Valdean C. Lambke, and Thomas E. King, 2000. "Advanced Financial Accounting " McGraw Hill International, New York.
- Sukanto, Reksohadiprojo (2001) Ekonomi publik, Yogyakarta BPFE.
- Setu Setyawan (2005), Analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah Se- Jawa Timur. Laporan hasil penelitian DIKTI tidak dipublikasikan.
- Shcenere, Papke (1996). Publik Finance & Fiscal Police (selected reading) Boston USA Houghton Mifflin co.
- Sidik, 2002. Format hubungan Keuangan pemerintah pusat dan Daerah yang mengacu pada hubungan Nasional , <http://www.Geogle.com> (diakses Juli 2007)
- Sumarmoko, 2000. Keuangan negara dalam teori & praktek edisi 5 Yogyakarta BPFE.
- Suparmoko M,(2003) Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan. Yogyakarta, Andi Offset.
- Sukiadi, 2004. Pengembangan Akuntansi Pemerintah di Indonesia, Jurnal Pajak, Jakarta
- Wijaya HAW, 2005 Penataan pemerintah daerah dalam rangka penataan otoda, <http://www.Geogle.com> (diakses Juli 2007)
- Triyono, 2002. Evaluasi Kinerja Pemerintah daerah, Jurnal akuntansi dan Keuangan Jurnal Penelitian FE-UGM Vol 1 September.
- , Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- , Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2005 tentang perubaha undang-undang Pemerintahan Daerah.
- , Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- , Peraturan pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah.
- ,peraturan pemerintah no 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantu